



**Analisis Penyebab Ketidakberlanjutan Program Pelatihan
(Studi Kasus Pelatihan Bakso Desa Bumirejo, Kecamatan Puring,
Kabupaten Kebumen)**

**Aola Nurjannah,
Nur Hamid**

UIN Walisongo Semarang

aolanurjannah7@gmail.com, elnur.hamid@walisongo.ac.id

Abstract

Every year the government is obliged to budget for human resource development programs in accordance with the proposals at the village development planning meeting. In this human resource development program, Bumirejo Village chose training as the basis for community development efforts. Especially increasing the productivity of housewives which is expected to be able to be utilized so that it can improve the family's economy and achieve community welfare. However, the fact is that the training was not sustainable or there was no follow-up afterwards. This study aims to dig deeper into the causes of unsustainability of training programs as part of program evaluation. Once it is known and understood, it will then be re-addressed so that it can run again for the common good. The method used in this research is descriptive qualitative through a case study approach in Bumirejo Village, Puring District, Kebumen Regency. Data were obtained through interviews with government officials, leaders, and community members. researchers also made observations and documentation in Bumirejo Village. The results of the study show that there are 3 main causes for the unsustainability of training programs, namely community participation and poor financial management. and not partnered. It is hoped that this research can become a recommendation for various village administrations to overcome existing obstacles as learning materials to improve programs or make better programs.

Keywords: *Family Economy; Training; Development*

Abstrak

Setiap tahunnya pemerintah wajib menganggarkan program pengembangan sumberdaya manusia sesuai dengan usulan pada musrembangdes. Dalam program pengembangan sumber daya manusia ini, Desa Bumirejo memilih pelatihan sebagai dasar dari upaya mengembangkan masyarakat. Terutama meningkatkan produktifitas ibu rumah tangga yang diharapkan mampu dimanfaatkan sehingga dapat meningkatkan perekonomian keluarga dan mencapai kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi faktanya pelatihan tersebut ternyata tidak berkelanjutan atau tidak ada followup setelahnya. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam penyebab ketidakberlanjutannya program pelatihan sebagai bagian dari evaluasi program. Setelah diketahui dan dipahami kemudian akan kembali dibenahi agar bisa kembali berjalan untuk kemaslahatan bersama. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif melalui pendekatan studi kasus di desa Bumirejo, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen. Data diperoleh melalui wawancara kepada, pemerintah, tokoh, dan warga masyarakat. peneliti juga melakukan observasi dan dokumentasi di Desa Bumirejo. Hasil penelitian memnunjukkan ada 3 penyebab utama ketidakberlanjutan program pelatihan yaitu partisipasi masyarakat, pengelolaan finansial yang kurang baik. dan tidak bermitra. Harapannya penelitian ini bisa menjadi rekomendasi begai pemerintahan desa untuk mengatasi kendala kendala yang ada sebagai bahan pembelajaran untuk memperbaiki program atau membuat program yang lebih baik.

Kata Kunci: Ekonomi Keluarga; Pelatihan; Pengembangan

A. Pendahuluan

Mayoritas penduduk Desa Bumirejo berprofesi sebagai petani dan buruh tani, yaitu sekitar 80%, sisanya berprofesi sebagai pegawai negeri, swasta dan pedagang. Profesi tani dan buruh tani tidak hanya dilakukan oleh laki-laki tapi juga oleh perempuan. Akan tetapi buruh tani perempuan hanya bekerja saat musim tanam saja, selebihnya mereka adalah ibu rumah tangga yang mengurus rumah dan keluarga. Dalam hal ini untuk meningkatkan produktifitas ibu rumah tangga pemerintah desa berinisiatif untuk menyelenggarakan program pelatihan bagi ibu rumah tangga.

Pelatihan tersebut juga merupakan implementasi dari salah satu kewajiban otonomi pemerintah desa untuk melaksanakan program pemberdayaan masyarakat. Sedikitnya 70% dari APBD dapat digunakan untuk pembangunan, pembinaan, penyelenggaraan program pemberdayaan masyarakat dan



penanggulangan bencana, sisanya yaitu 30% digunakan untuk menopang kegiatan pemerintahan desa.¹ Upaya peningkatan SDM masuk ke dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Peningkatan SDM tidak hanya melalui pendidikan untuk anak-anak akan tetapi peningkatan produktifitas ibu rumah tangga juga masuk kedalamnya. Untuk itu penting dilakukan pelatihan bagi para ibu rumah tangga. Selain meningkatkan produktifitas apabila program ini berlanjut juga mampu meningkatkan skill dan ekonomi masyarakat. Perempuan atau ibu rumah tangga juga mempunyai hak yang sama untuk meningkatkan perekonomian keluarga.

B. Kajian Teori

Menurut Sumodiningrat pemberdayaan merupakan serangkaian dukungan untuk meningkatkan kemampuan serta memperluas segala akses kehidupan sehingga mampu mendorong kemandirian yang berkelanjutan terhadap masyarakat.² Maka sesuai dengan teori tersebut program yang dirancang harus dilakukan secara berkelanjutan untuk mencapai hasil atau tujuan yang diharapkan atau dapat disebut dengan istilah sustainable development. Hal ini lah yang masih menjadi masalah dalam beragam program yang dibuta oleh pemerintah desa. Ketidakberlanjutan program bukan hanya dalam hal pelatihan kali ini saja tapi juga dalam pelatihan tahun-tahun sebelumnya.

Sebuah program harus direncanakan sedetail mungkin dan dianalisis mengenai SWOT (strength, weaknes, opportunity, dan threats).³ Direncanakan dengan baik dengan melibatkan 5M (man, money, methode, mechine, material,

¹ Risyah Novita Sari, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Kantor Pemerintahan Desa Ngasem, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri)" (Brawijaya University, 2015), 3.

² Bachtiar Rifa'i, "Efektivitas Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Krupuk Ikan Dalam Program Pengembangan Labsite Pemberdayaan Masyarakat Desa Kedung Rejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo," *Sumber* 100, no. 100 (2013): 6.

³ Sutikno Sutikno et al., "Pemilihan Program Pengentasan Kemiskinan Melalui Pengembangan Model Pemberdayaan Masyarakat Dengan Pendekatan Sistem," *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan* 11, no. 1 (2015): 7.

dan market).⁴ Direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi bersama masyarakat. karena masyarakat tidak hanya dijadikan sebagai objek tapi juga sebagai subjek program.⁵ Perencanaan tersebut juga harus ditentukan jangka waktunya, tujuan utama dan tahapannya untuk mencapai tujuan utama tersebut.

Kaitannya dengan pelaksanaan program untuk memberdayakan masyarakat terdapat prinsip-prinsip yang harus terpenuhi. Seperti dalam buku Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik milik Totok Madikanto terdapat 10 prinsip pemberdayaan masyarakat diantaranya adalah berorientasi pada pembangunan kapasitas, penumbuhan partisipasi masyarakat, dan berkelanjutan.⁶

1. Berpusat pada masyarakat

Ketertinggalan, marginal atau kemiskinan merupakan akibat dari pembangunan yang menggunakan pendekatan *buttom up* yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, yakni pendekatan dan orientasi yang mementingkan hasil dan mengabaikan masyarakat mayoritas dalam proses.⁷ Sehingga, masyarakat mayoritas terbelenggu dalam ide dan kreativitas (pasif), kurang dalam pengetahuan dan pengalaman. Hal ini sesuai dengan tiga (3) dari lima (5) ciri pembangunan berpusat pada manusia yang dirumuskan oleh Moeljarto Tjokrowinoto dalam Totok Madikanto, sebagai berikut: Pertama, prakarsa dalam pengambilan keputusan diletakkan pada masyarakat. Kedua, fokus utamanya adalah meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengelola dan memobilisasi sumber daya lokal. Ketiga, menekankan pada proses pembelajaran sosial yang didalamnya terdapat

⁴ I Wayan Kartimin, Ni Wayan Mekarini, and Ni Nyoman Arini, "Potensi Desa Wisata Munggu Sebagai Daya Tarik Wisata Berbasis Masyarakat Di Kabupaten Badung," *Jurnal Ilmiah Hospitality Management* 13, no. 1 (2022): 2.

⁵ Teguh Ansori, "Revitalisasi Dakwah Sebagai Paradigma Pemberdayaan Masyarakat," *Muharrrik: Jurnal Dakwah Dan Sosial* 2, no. 01 (2019): 6.

⁶ Totok Madikanto and Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik* (Alfabeta, 2012), 105–109.

⁷ Faizal Faizal, "Diskursus Pemberdayaan Masyarakat," *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 8, no. 1 (2015): 9.



interaksi kolaboratif antara birokrasi dengan komunitas.⁸ Dengan kata lain, pembangunan berpusat pada masyarakat atau empowerment menjadikan masyarakat menjadi aktor dan penentu pembangunan.

Pengembangan kulaitas SDM merupakan kegiatan pengembangan yang berorientasi pada: Pertama, pengembangan kapasitas individu yang meliputi kapasitas kepribadian, kapasitas di dunia kerja, dan kapasitas keprofesionalan. Kedua, pengembangan kapasitas entitas/kelembagaan, yang meliputi; (1) kejelasan visi, misi, dan budaya organisasi; (2) kejelasan struktur organisasi, kompetensi, dan strategi organisasi; (3) proses organisasi atau pengelolaan organisasi; (4) interaksi antar individu di dalam organisasi; (5) pengembangan jumlah dan mutu sumberdaya; dan (6) interaksi dengan entitas organisasi dengan pemangku kepentingan (stakeholders) yang lain. Ketiga, pengembangan kapasitas sistem (jaringan), meliputi: pengembangan interaksi antar entitas (organisasi) dalam sistem yang sama dan dengan entitas/organisasi di luar sistem.⁹

2. Partisipasi masyarakat

Pemberdayaan yang berpusat pada manusia (human centered)¹⁰ bertujuan memperkuat kapasitas (kemampuan), baik yang bersifat pengetahuan (knowlage) dan keterampilan (skill) maupun pengalaman. Tingginya partisipasi masyarakat merupakan tolak ukur untuk keberhasilan pelaksanaan kebijakan yang diambil pemerintah karena sekarang daaerah atau desa memiliki wewenang untuk merumuskan kebutuhan dan merancang programnya sendiri menggunakan sistem buttem up.

⁸ Mardikanto and Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, 18.

⁹ Faizal, "Diskursus Pemberdayaan Masyarakat," 11.

¹⁰ Muhammad Alhada Fuadilah Habib, "Kajian Teoritis Pemberdayaan Masyarakat Dan Ekonomi Kreatif," *Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy* 1, no. 2 (2021): 25.

Keterlibatan masyarakat dapat dilihat dari sifatnya, menurut Koentjoro Ningrat, keterlibatan dibagi menjadi dua, yakni bersifat kuantitatif, yakni partisipasi dilihat dari frekuensi keikutsertaan masyarakat dalam implementasi program. Keterlibatan yang bersifat kualitatif, yakni partisipasi yang dilihat dari tingkat dan derajat partisipasi. Kesadaran untuk berpartisipasi merupakan hak sekaligus kewajiban. Hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri dan hak serta tanggung jawab untuk berpartisipasi.¹¹ Jadi partisipasi masyarakat merupakan aspek penting mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program.

3. Berkelanjutan

Keistimewaan prinsip keberlanjutan adalah dapat membangun struktur, organisasi, bisnis, dan industri yang dapat tumbuh dan berkembang dalam berbagai tantangan. Sebab, akan tercipta masyarakat yang kuat, seimbang, dan harmonis. Kuat karena tidak tergantung pada pihak lain, seimbang dan harmonis karena dilakukan secara proporsional dan bersama-sama. Menurut Brundtland Commission, pembangunan yang berkelanjutan adalah praktek pembangunan untuk memenuhi kebutuhan saat ini, tanpa menurunkan atau merusak kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan hidup.¹² Orientasi pembangunan berkelanjutan juga meliputi tiga hal utama yaitu lingkungan, ekonomi, dan sosial. Tujuan pembangunan berkelanjutan dalam aspek ekonomi dan sosial dapat direalisasikan jika ada kebijakan yang mampu menumbuhkan partisipasi masyarakat, pemerintah, dan awasta.

Sementara dalam pendapat Agama Islam pemberdayaan Masyarakat dalam pelaksanaannya harus berpegang pada 3 prinsip utama; ketiga prinsip itu adalah prinsip ukhuwwah, prinsip ta'awun dan prinsip persamaan derajat.

¹¹ Jim Ife and Frank Tesoriero, "Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat Di Era Globalisasi," *Yogyakarta: Pustaka Pelajar* 265 (2008): 292.

¹² Widya Saputri, Wahyu Andryan, and Dosen Pengantar Ilmu Khodijah, "Pembangunan Berkelanjutan Sdgs 2030: Zero Hunger (Goal2)" (n.d.): 3.



1. Prinsip ukhuwwah

Ukhuwwah dalam bahasa arab berarti persaudaraan. Prinsip ini menegaskan bahwa tiap-tiap muslim saling bersaudara, walaupun tidak ada pertalian darah antara mereka. Rasa persaudaraan menjamin adanya rasa empati dan merekatkan silaturahmi dalam masyarakat.

2. Prinsip ta'awun

Allah SWT mendorong manusia untuk saling tolongmenolong sesamanya. Prinsip ta'awun atau tolong-menolong ini merupakan prinsip yang utama dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Karena sesungguhnya program pemberdayaan itu adalah sebuah upaya menolong individu dan masyarakat yang membutuhkan bantuan dan bimbingan

3. Prinsip persamaan derajat antar umat manusia

Islam telah memproklamkan persamaan derajat antar umat manusia sejak 14 abad yang lalu. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, ayat ini merupakan dorongan bagi semua pihak untuk terus bersama memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.¹³

Menurut Ife, program pemberdayaan masyarakat hanya mungkin dapat mewujudkan indikator-indikator keberdayaan bila ia dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pemberdayaan, seperti prinsip holisme, keberlanjutan, keanekaragaman, perkembangan organik, perkembangan yang seimbang, dan mengatasi struktur yang merugikan.¹⁴ Untuk itu dalam program pemberdayaan harus memperhatikan indicator-indikator tersebut agar program pemberdayaan dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya sering kali terdapat program yang tidak berjalan dengan baik dan tidak dapat mencapai tujuannya. Untuk itu perlu adanya kajian

¹³ Ulfi Putra Sany, "Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Al Qur'an," *Jurnal Ilmu Dakwah* 39, no. 1 (2019): 35.

¹⁴ Nahar Effendi, "Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat Nelayan," *Jurnal Administrasi Publik dan Bisnis (JaPaBis)* 1, no. 1 (2019): 3.

mengenai evaluasi kendala untuk mencari solusi yang sesuai. Dalah satu bagian dari evaluasi yang perlu dilakukan adalah melakukan analisis penyebabnya.

C. Metode Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Desa Bumirejo, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah dengan pertimbangan desa tersebut merupakan salah satu desa yang setiap tahunnya melakukan pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM tanpa melakukan Follow up. Sehingga masyarakat di desa tersebut masih dalam perekonomian menengah kebawah dan banyak ibu rumah tangga yang menganggur. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dengan melakukan observasi dan wawancara juga berdasarkan pada sumber yang terpercaya. Data informasi tentang pelatihan bakso desa didapatkan dari studi dokumentasi Desa Bumirejo. Informasi mengenai prinsip-prinsip pelaksanaan program pemberdayaan di dengan studi pustaka (library) yang dikumpulkan dari karya tulis cetak maupun karya tulis digital berupa buku dan jurnal ilmiah. Peneliti juga melaksanakan observasi, survey lapangan secara langsung yang berupa wawancara kepada 5 pemerintah desa, coordinator dan 10 ibu PKK juga 15 warga desa yang terlibat dalam pelatihan pembuatan bakso. Kajian ini akan membahas mengenai analisis faktor penyebab ketidakberlanjutan program pelatihan bakso di Desa Bumirejo, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.

D. Hasil dan Pembahasan

Analisis pelatihan pembuatan bakso menggunakan 5 M dan POAC

Unsur	Fungsi
Man: Pemerintah Desa, Ibu PKK, Ketua Rw/Rt, Owner Pabrik Bakso	Planning: 1. Melakukan pendataan ibu rumah tangga 2. Koordinasi panitia dari pemerintah desa dengan ibu PKK 3. Mengundang pelatih dari pemilik pabrik bakso 4. Pelatihan pada 26 November 2022 5. Bertempat di Balai Desa
Maney:	Organizing: 1. Ibu Muji sebagai perwakilan panitia pelatihan 2. Ibu Yati sebagai coordinator ibu PKK



Anggaran 700.000 diperoleh dari ADD Dengan rincian Pemateri: 100.000 Bungkisan: 50.000 Snack: 100.000 Bahan: 350.000	
Material: daging ayam, bumbu-bumbu, wadah	Aktuating: 1. Dilaksanakan sesuai dengan tempat dan tanggal yang direncanakan 2. Hanya 40% ibu rumah tangga yang hadir
Mechine: mesin giling, pisau,	Controlling: a. Pre: perencanaan pelatihan hanya 1 kali dan tujuannya kurang jelas, tidak dijelaskan pada ibu rumah tangga tujuan dari dilaksanakannya pelatihan tersebut, b. Proses: waktunya molor dan partisipasinya kurang dari ibu rumah tangga c. Past: tidak ada follow up dari pelatihan untuk mencapai tujuan yang seharusnya dicapai
Methode: teori, praktik	
Market: Ibu Rumah Tangga Desa Bumirejo	

Pemerintah desa berupaya untuk meningkatkan perekonomian keluarga melalui peningkatan produktifitas ibu rumah tangga. Mengingat bahwa rumah tangga keluarga merupakan aspek terkecil dari rumah tangga yang lain. Hal itu dikarenakan rumah tangga bisa dimaknai dengan perusahaan, desa, kota, bahkan negara yang merujuk pada suatu kelompok social.¹⁵ Langkah awal yang dilakukan pemerintah desa adalah dengan melakukan pemetaan kemudian pelatihan guna untuk menambah skill ibu rumah tangga.¹⁶ Sayangnya tujuan itu masih sebatas untuk menambah skill. Setelah pelatihan dilaksanakan tidak ada

¹⁵ Suherman Rosyidi, "Pengantar Teori Ekonomi Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro Dan Makro, Edisi Baru," *Jakarta: PT RajaGrafindo Persada* (2004): 43.

¹⁶ Anharudin Anharudin et al., "Peningkatan Ekonomi Masyarakat Melalui Keterampilan Membuat Nugget Berbahan Dasar Ikan Bandeng Sebagai Bahan Pangan Lokal," *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan* 19, no. 2 (2019): 4.

pendampingan dari pihak desa. implementasi dari pelatihan yang dilaksanakan dianggap sebagai hak setiap ibu rumah tangga untuk memanfaatkannya atau tidak. Pemerintah desa tidak menyediakan wadah sebagai langkah selanjutnya untuk mengimplementasikan hasil pelatihan tersebut. Untuk itu ada evaluasi yang menjabarkan penyebab dari ketidakberlanjutan program tersebut ada 3 yaitu

Ada 3 penyebab ketidakberlanjutan program pelatihan bakso

1. Partisipasi dan antusias masyarakat

Pelatihan yang diadakan merupakan hasil dari inisiatif satu orang, bukan hasil dari kesepakatan bersama. Meskipun demikian inisiatif tersebut ada berdasarkan melihat aset yang ada, kemudian dikembangkan menjadi usulan adanya pelatihan ini guna untuk memecahkan masalah kurang produktifnya ibu rumah tangga.¹⁷ Adapun aset yang dimaksud disini adalah potensi yang dimiliki ibu rumah tangga juga desa.¹⁸ Kemudian anggota PKK yang lainnya hanya mengikuti saja. Sebenarnya meskipun demikian partisipasi masyarakat tetap tinggi akan tetapi sayangnya tidak ada wadah yang disediakan oleh pemerintah desa. pelatihan tersebut dianggap sudah tepat oleh kebanyakan ibu rumah tangga, namun apabila ibu rumah tangga dibiarkan untuk berjalan sendiri, dalam proses pembuatan dan pemasaran bakso masih kurang mampu. Pertama dan yang utama adalah keterbatasan alat, tenaga, dan biaya sebagai modal. Belum lagi dalam proses pemasaran, ibu rumah tangga belum diajarkan dan tidak mempunyai alat untuk menjadikan bakso sebagai frozen food. Jadi jika ingin memasarkan hanya dalam skala kecil, dan jangka waktu yang tidak terlalu lama. Belum lagi kenalan atau relasi ibu rumah tangga itu sendiri yang belum cukup luas, tidak ada mitra yang disediakan oleh pihak desa dan tidak ada inisiasi dari

¹⁷ Essthih Fithriyana, "Pengolahan Produk Berbahan Dasar Buah Pepaya Sebagai Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pedesaan," *AL-UMRON: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 2 (2020): 4.

¹⁸ Fuad Fitriawan et al., "Pemberdayaan Ekonomi Pemuda Melalui Budidaya Jamur Tiram Di Dusun Sidowayah, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo," *Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement* 1, no. 1 (2020): 7.



ibu PKK untuk menjalin mitra dengan pihak swasta atau pedagang. Mitra bisa dibangun dengan pabrik ayam potong yang berada di sebelah DESA bumirejo. Kemudian bermitra dengan warung warung pasar ataupun rumahan. Selain itu bisa juga dengan bermitra dengan pedagang bakso. Selain dijual mentahan, bakso bisa juga dijual dalam bentuk olahan. Dengan begitu akan mampu memberdayakan lebih banyak ibu rumah tangga.

2. Pendampingan pemerintahan desa

Pendampingan dari pemerintah desa merupakan bagian tak terpisahkan yang seharusnya dilakukan sebagai wujud dari pembangunan masyarakat berkelanjutan. Pendampingan tersebut merupakan bentuk pengawasan pemerintah desa sebagai stakeholder terhadap partpaicipasi masyarakat mulai dari penyusunan, pelaksanaan, dan pengembangan atau evaluasi.¹⁹ Keterlibatan stakeholder dalam pemberdayaan dapat dilihat dari tiga tahapan yakni penyadaran, pengkapasitasan, dan tahap pendayaan.²⁰ Sayangnya hal itu tidak dilakukan oleh pihak pemerintah Desa Bumirejo secara sempurna. Pelatihan diadakan hanya untuk menambah keterampilan masyarakat. kelanjutan dari pelatihan tersebut ditentukan oleh masyarakat itu sendiri. Jika masyarakat ingin menggunakan ilmu tersebut untuk berusaha tentu masyarakat harus berusaha sendiri dari modal, peoduksi, dan penjualannya. Pihak desa tidak memnyediakan tahapan lanjutan dan wadah untuk masyarakat menggunakan ilmu yang didapat dari pelatihan. Parahnya hal itu tidak hanya terjadi pada pelatihan kali ini saja tapi disetiap pelatihan yang diakdakan pemerintah desa. hal itulah salah satunya yang menjadikan masyarakat Desa Bumirejo tidak kunjung meningkat perekonomiannya apalagi sejahtera. Sedangkan salah satu kebiasaan masyarakat desa adalah bergantung pada arahan pemerintah desa.

¹⁹ Hendrawati Hamid, "Manajemen Pemberdayaan Masyarakat" (De la macca, 2018), 189.

²⁰ Isti Fajaroh, Eko Murdiyanto, and Budiarto Budiarto, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Urban Farming Oleh Kelompok Wanita Tani Srikandi Kapanewon Depok Kabupaten Sleman," *Jurnal Dinamika Sosial Ekonomi* 23, no. 1 (2022): 14.

Untuk itu seharusnya pemerintah desa juga melakukan follow up dari pelatihan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang sesungguhnya yaitu mencapai kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan perekonomian keluarga. Dalam hal ini dilakukan oleh ibu rumah tangga melalui pembuatan bakso. Seharusnya pemerintah desa membentuk kelompok ibu rumah tangga yang menjaring semua ibu rumah tangga, tidak hanya perwakilan saja. Hal itu mampu mempermudah pelaksanaan program yang direncanakan oleh pemerintah desa. hal itu mampu mempermudah dalam pengkoordinasian ibu rumah tangga untuk melakukan tahapan selanjutnya disetiap program yang direncanakan.

Setelah adanya pelatihan pembuatan bakso, untuk ibu rumah tangga diberi kebebasan untuk memanfaatkan skill yang sudah diberikan saat pelatihan atau tidak. Jadi tugas pemerintah desa selesai setelah mengadakan pelatihan bagi ibu rumah tangga. Tidak ada analisis atau perencanaan program yang matang dan berkelanjutan. Bahkan tidak sampai pada tahapan pemasaran apalagi evaluasi bersama.

3. Tidak ada mitra untuk penjualan

Pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan pendekatan ABCD ini, akan mampu memberikan kesempatan kepada mitra (masyarakat yang diberdayakan) untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya dengan menggunakan potensi yang dimilikinya sendiri, sehingga akan menciptakan suatu kemandirian bagi masyarakat mitra.²¹ Begitu juga dengan pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk warganya tentu bukan tanpa alasan, dan dilakukan dengan melihat potensi yang ada. Bakso merupakan salah satu makanan yang digemari oleh banyak orang dan bisa diperjualbelikan tanpa melihat musu. Dengan kata lain pasarnya luas dan mudah dikreasikan. Selain itu Desa Bumirejo juga merupakan salah satu desa yang dekat dengan pabrik besar ayam potong. Jika ingin dikembangkan

²¹ Alhamuddin Alhamuddin et al., "Pemberdayaan Berbasis Asset Based Community Development Untuk Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru Madrasah Di Era Industri 4.0," *International Journal of Community Service Learning* 4, no. 4 (2020): 3.



sebenarnya Desa Bumirejo bisa mengajukan Kerjasama dengan pabrik tersebut dengan mengajukan proposal kepada CSR pabrik. Dengan demikian maka akan mempermudah pemroduksian bakso dengan bahan berkualitas. Kemudian dengan proses pengolahan tersebut mampu meningkatkan produktifitas ibu rumah tangga dan mampu meningkatkan perekonomian keluarga.

Selanjutnya yaitu tahapan pengemasan bisa dibuat menjadi frozen food, dan bisa juga dijual secara langsung. Desa Bumirejo juga merupakan desa yang strategis karena berdekatan dengan banyak pasar. Selain itu juga terdapat banyak warung di dalam des aitu sendiri. Selain itu Desa Bumirejo juga merupakan desa yang dekat dengan banyak wisata pantai. Jika desa ini tidak mampu menjadi desa wisata, maka desa ini bisa menjadi desa pendukung desa wisata yang dalam hal ini adalah mensuplay makanan olahan dari bakso. Bakso bisa diolah menjadi beragam makanan baik yang berjangka waktu pendek maupun berjangka waktu panjang seperti basreng atau inovais olahan bakso lainnya. Olahan bakso inilah yang seharusnya dilakukan oleh pihak pemerintah desa sebagai upaya pendampingan ibu rumah tangga. Seharusnya pemerintah desa sebagai stakeholder meningkatkan koordinasi dengan ibu PKK sebagai organisasi desa untuk mengkondisikan ibu rumah tangga. Karena pada dasarnya stakeholders dan organisasi saling mempengaruhi, hal ini dapat dilihat dari hubungan sosial keduanya yang berbentuk responsibilitas dan akuntabilitas. Oleh karena itu organisasi memiliki akuntabilitas terhadap stakeholdersnya. Jika pemerintah melakukannya maka pendampingan akan menjadi lebih mudah.²²

Untuk itu pentingnya bermitra dalam upaya yang dilakukan pemerintah desa untuk mencapai peningkatan ekonomi keluarga dan kesejahteraan

²² Marzully Nur and Denies Priantinah, "Analisis Faktor-Fakor Yang Mempengaruhi," *Jurnal Nominal*, 11 (2012): 8.

masyarakat. Untuk mengembangkan dan memajukan usaha selain didukung oleh pemerintah desa juga membutuhkan pihak swasta atau adanya mitra dengan pihak lain. relasi akan membantu mengembangkan karya. Mempermudah karya untuk dikenal oleh khalayak yang lebih luas.

Ketiga factor penyebab ketidakberlanjutan program yang telah dipaparkan memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya seperti mata rantai. Untuk itu perlu dilakukan pembenahan satu persatu. Salah satu pembenahan yang utama adalah perencanaan yang matang dengan mempertimbangkan aspek tujuan yang ingin dicapai, orang atau lembaga yang akan terlibat dalam program pemberdayaan tersebut, dan keberlanjutan program. Salah satu hal yang perlu diperhatikan agar program dapat berlanjut adalah meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pemenuhan apa yang mereka butuhkan dan inginkan sebagai sarana pemecahan masalah yang mereka hadapi. Keterlibatan masyarakat sejak awal, perencanaan yang matang, juga pendampingan dari pihak desa atau tenaga pendamping program maka akan mampu meningkatkan mitra yang minat untuk bekerjasama dan keberlanjutan program akan terjamin.

E. Kesimpulan

Pelatihan pembuatan bakso merupakan tahapan upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk meningkatkan kualitas SDM terutama ibu rumah tangga melalui pemberian softskill atau keahlian pada ibu rumah tangga. Akan tetapi dari pelatihan tersebut tidak ada follow up yang dilakukan oleh pemerintah desa sebagai fasilitator warganya. Hal itu menjadikan tujuan menuju SDM yang berkualitas dan kesejahteraan keluarga tidak kunjung tercapai. Hal itu dikarenakan program yang dibuat oleh pemerintah desa tidak berkelanjutan atau sustainable. Ketidakberlanjutan program tersebut disebabkan oleh 3 hal yaitu partisipasi dari masyarakat yang kurang diawal, dukungan dan pendampingan pemerintah desa yang minim, juga pemerintah desa yang tidak berupaya untuk menjalin mitra atau memperluas jaringan untuk mengembangkan softskill yang sudah diberikan. Harapannya penelitian ini bisa menjadi pertimbangan agar menjadi evaluasi bersama sebagai bahan pembenahan untuk program yang ada atau yang akan datang.



Daftar Pustaka

- Alhamuddin, Alhamuddin, Helmi Aziz, Dinar Nur Inten, and Dewi Mulyani. "Pemberdayaan Berbasis Asset Based Community Development Untuk Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru Madrasah Di Era Industri 4.0." *International Journal of Community Service Learning* 4, no. 4 (2020): 321–331.
- Anharudin, Anharudin, Donny Fernando, Saefudin Saefudin, Diki Susandi, and Saleh Dwiyanoto. "Peningkatan Ekonomi Masyarakat Melalui Keterampilan Membuat Nugget Berbahan Dasar Ikan Bandeng Sebagai Bahan Pangan Lokal." *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan* 19, no. 2 (2019).
- Ansori, Teguh. "Revitalisasi Dakwah Sebagai Paradigma Pemberdayaan Masyarakat." *Muharrrik: Jurnal Dakwah Dan Sosial* 2, no. 01 (2019): 33–44.
- Effendi, Nahar. "Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat Nelayan." *Jurnal Administrasi Publik dan Bisnis (JaPaBis)* 1, no. 1 (2019).
- Faizal, Faizal. "Diskursus Pemberdayaan Masyarakat." *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 8, no. 1 (2015): 35–51.
- Fajaroh, Isti, Eko Murdiyanto, and Budiarto Budiarto. "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Urban Farming Oleh Kelompok Wanita Tani Srikandi Kapanewon Depok Kabupaten Sleman." *Jurnal Dinamika Sosial Ekonomi* 23, no. 1 (2022): 57–71.
- Fithriyana, Eshtih. "Pengolahan Produk Berbahan Dasar Buah Pepaya Sebagai Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pedesaan." *AL-UMRON: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 2 (2020): 1–9.
- Fitriawan, Fuad, Dawam Multazamy Rohmatulloh, Asfahani Asfahani, and Risa Alfiah Ulfa. "Pemberdayaan Ekonomi Pemuda Melalui Budidaya Jamur Tiram Di Dusun Sidowayah, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo." *Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement* 1, no. 1 (2020): 47–58.
- Habib, Muhammad Alhada Fuadilah. "Kajian Teoritis Pemberdayaan Masyarakat Dan Ekonomi Kreatif." *Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy* 1, no. 2 (2021): 82–110.
- Hamid, Hendrawati. "Manajemen Pemberdayaan Masyarakat." De la macca, 2018.
- Ife, Jim, and Frank Tesoriero. "Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat Di Era Globalisasi." *Yogyakarta: Pustaka Pelajar* 265 (2008).
- Kartimin, I Wayan, Ni Wayan Mekarini, and Ni Nyoman Arini. "Potensi Desa Wisata Munggu Sebagai Daya Tarik Wisata Berbasis Masyarakat Di Kabupaten Badung." *Jurnal Ilmiah Hospitality Management* 13, no. 1 (2022): 34–41.
- Mardikanto, Totok, and Poerwoko Soebianto. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Alfabeta, 2012.

- Nur, Marzully, and Denies Priantinah. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi.” *Jurnal Nominal*, 11 (2012): 24.
- Rifa'i, Bachtiar. “Efektivitas Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Krupuk Ikan Dalam Program Pengembangan Labsite Pemberdayaan Masyarakat Desa Kedung Rejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo.” *Sumber 100*, no. 100 (2013): 2–59.
- Rosyidi, Suherman. “Pengantar Teori Ekonomi Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro Dan Makro, Edisi Baru.” *Jakarta: PT RajaGrafindo Persada* (2004).
- Sany, Ulfi Putra. “Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Al Qur'an.” *Jurnal Ilmu Dakwah* 39, no. 1 (2019): 32–44.
- Saputri, Widya, Wahyu Andryan, and Dosen Pengantar Ilmu Khodijah. “PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN SDGs 2030: Zero Hunger (Goal2)” (n.d.).
- Sari, Risyia Novita. “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Kantor Pemerintahan Desa Ngasem, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri).” Brawijaya University, 2015.
- Sutikno, Sutikno, Eddy Setiadi Soedjono, Agnes Tuti Rumiati, and Lantip Trisunarno. “Pemilihan Program Pengentasan Kemiskinan Melalui Pengembangan Model Pemberdayaan Masyarakat Dengan Pendekatan Sistem.” *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan* 11, no. 1 (2015): 135–147.